

**HUSAINI**

**KOMITE AUDIT &  
AUDIT INTERNAL:**  
**Integritas Pengawasan Korporasi**

**UNPAD PRESS**

2 *Husaini*

---

Ganjar Kurnia  
Mahfud Arifin, Engkus Kuswarno  
Memed Sueb

**TIM EDITOR**

Wilson Nadeak (Koordinator), Tuhpawana P. Sendjadja  
Fatimah Djasudarma, Benito A. Kurnani  
Denie Hariyadi, Wahya, Cece Sobarna  
Dian Indira

Judul : *Komite Audit & Audit Internal:  
Integritas Pengawasan Korporasi*  
Penulis : *Husaini*  
Tata Letak : *Trisatya*

UNPAD PRESS  
Copyright © 2009  
ISBN : 978-979-3985-60-9

## PENGANTAR

Alhamdulillah akhirnya penulisan buku ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan bagian dari program penulisan buku bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan Program Doktor pada Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: Ibu Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, SE., MS., Ak, sebagai ketua tim Promotor, Bapak Dr. Memed Sueb, SE., MS., Ak dan Ibu Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE., MS, Ak selaku anggota tim Promotor, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan, senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan serta wawasan yang tak ternilai kepada penulis selama menyelesaikan buku ini; tim pengarah dan tim editor yang telah dengan tulus memberikan arahan, pengeditan terutama mengenai teknis penulisan, serta review keseluruhan isi buku ini, hingga menjadi sebuah karya yang layak untuk diterbitkan; dan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depdiknas sebagai penyelenggara Program Hibah Penelitian untuk Mahasiswa Program Doktor tahun 2009/2010 yang telah mendanai penulisan buku ini.

Integritas pengawasan dalam sebuah korporasi merupakan faktor penting yang harus dimiliki, terutama untuk memastikan bahwa proses *corporate governance* dapat berjalan dengan baik. Komite audit dan audit internal diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, sebab kedua fungsi ini termasuk ke dalam pilar-pilar struktur *governance*, di samping pilar-pilar lainnya. Interaksi yang baik antara keduanya diharapkan dapat meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan pengendalian serta dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Penulis menyadari bahwa, karya ini belumlah sempurna, oleh karena itu, masukan dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan buku ini pada masa yang akan datang.

Bandung, November 2009  
Penulis

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vi
 <b>BAB 1</b>	
<b>TUJUAN DAN FUNGSI PENGAWASAN ORGANISASI</b>	<b>1</b>
 <b>BAB 2</b>	
<b>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</b>	<b>11</b>
Teori Agensi dan Kebutuhan GCG	14
Pengertian <i>Corporate Governance</i>	16
Struktur dan Proses Governance	18
Prinsip GCG	24
Contoh Kasus Penyimpangan GCG	27
<i>Governance</i> , Manajemen risiko dan Pengendalian	32
Komite Audit, Audit Internal dan <i>Corporate Governance</i>	34
Posisi Komite Audit dan Internal Audit dalam Struktur <i>Corporate Governance</i>	36
 <b>BAB 3</b>	
<b>KOMITE AUDIT</b>	<b>39</b>
Definisi Komite Audit	44
Tujuan dan Manfaat Pembentukan Komite Audit	45
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	47
Lingkup Kerja Komite Audit	51
Hubungan Kerja Komite Audit	58
Efektivitas Komite Audit	60
 <b>BAB 4</b>	
<b>AUDIT INTERNAL</b>	<b>63</b>
Definisi Audit Internal	64
Lingkup Pekerjaan Fungsi Audit Internal	68

<i>Charter</i> Audit Internal	70
Independensi dan Objektivitas Fungsi Audit Internal	72
Kecakupan dan Kecermatan Profesional Audit Internal	74
Kerangka Praktik Audit Internal	74
<b>Kode Etik Auditor Internal</b>	76
Standar Praktik Profesi Audit Internal	77
Hubungan Audit Internal dan Komite Audit	79
 <b>BAB 5</b>	
<b>MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>83</b>
Definisi Risiko	85
Jenis-Jenis Risiko	87
Definisi Manajemen Risiko	90
Kerangka ERM COSO	93
Tujuan ERM COSO	93
Komponen-Komponen ERM COSO	95
Proses Manajemen Risiko	104
Komite Audit dan Manajemen Risiko	107
Audit Internal dan Manajemen Risiko	109
 <b>BAB 6</b>	
<b>PENGENDALIAN INTERN</b>	<b>117</b>
<b>Kerangka Pengendalian Internal</b>	120
 <b>Komponen Pengendalian Intern</b>	121
 <b>Keterbatasan Pengendalian Intern</b>	127
Komite Audit dan Pengendalian Intern	128
Audit Internal dan Pengendalian Intern	131
 <b>BAB 7</b>	
<b>PENCEGAHAN FRAUD</b>	<b>133</b>

<b>Jenis-Jenis Fraud</b>	134
Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya <i>Fraud</i>	136
Penyebab Terjadinya <i>Fraud</i>	139
Pedoman Pencegahan Fraud	140
Komite Audit, Audit Internal dan Pencegahan <i>Fraud</i>	142
<i>Corporate Governance</i> , Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Pencegahan <i>Fraud</i>	145
 <b>Catatan Akhir</b>	<b>151</b>
<b>Lampiran</b>	<b>161</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>173</b>
<b>Glosari</b>	<b>179</b>
<b>Indeks</b>	<b>187</b>

## TUJUAN DAN FUNGSI PENGAWASAN ORGANISASI

### BAB 1

Setiap organisasi yang didirikan pasti mempunyai tujuan. Tujuan organisasi biasanya mencerminkan apa yang ingin dicapai dalam setiap aktivitasnya, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Keberhasilan organisasi biasanya diukur dengan kemampuan organisasi yang bersangkutan dalam mencapai tujuannya pada periode tertentu. Pada tingkatan yang lebih tinggi, tujuan organisasi terlihat pada misi dan visi organisasi. Secara umum, misi menggambarkan apa yang ingin dicapai saat ini (jangka pendek), sedangkan visi merupakan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (jangka panjang).

*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) tahun 2004 mengelompokkan tujuan organisasi ke dalam<sup>1</sup>: Tujuan strategis, tujuan operasional, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan.

- **Tujuan-tujuan strategis**, yaitu menyangkut pilihan-pilihan penciptaan nilai yang dibuat oleh manajemen atas nama stakeholder organisasi.
- **Tujuan operasional**, yaitu menyangkut efektivitas dan efisiensi operasi organisasi, termasuk kinerja dan sasaran profitabilitas serta pengamanan sumber daya dari kerugian.
- **Tujuan pelaporan**, yaitu menyangkut kehandalan pelaporan informasi finansial dan nonfinansial untuk pihak internal dan eksternal.
- **Tujuan kepatuhan**, menyangkut ketaatan kepada undang-undang dan regulasi yang berlaku.

Perusahaan harus mampu untuk mengukur target yang akan dicapai selama periode tertentu dengan menentukan parameter guna mengevaluasi pencapaian tujuan yang sesungguhnya.

Suatu organisasi akan sulit, bahkan tidak dapat mencapai tujuannya tanpa melaksanakan proses *governance*, manajemen risiko dan pengendalian secara efektif<sup>2</sup>. Proses ini kompleks dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Proses *governance* menjadi titik awal yang baik karena biasanya dipandang sebagai proses paling luas dari ketiga proses di atas. *Governance* adalah proses yang dijalankan oleh dewan komisaris dan direksi untuk menggerakkan, mengarahkan, dan mengawasi manajemen menuju pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen risiko berkaitan erat dengan proses *governance*, yang merupakan proses yang dijalankan oleh manajemen untuk memahami dan menghadapi ketidakpastian (risiko dan peluang) yang dapat memengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Risiko merupakan kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berpengaruh

buruk pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan peluang merupakan kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berpengaruh positif pada pencapaian tujuan.

Selanjutnya, pengendalian yang sering disebut pengendalian intern, diwujudkan dalam manajemen risiko karena pengendalian intern merupakan bagian integral dari manajemen risiko. Pengendalian merupakan proses yang dijalankan oleh manajemen untuk mengurangi risiko sampai tingkat yang paling rendah yang dapat diterima.

Ketiga proses ini berfokus pada pencapaian tujuan organisasi, bahwa dewan komisaris dan direksi bertanggung jawab untuk menjalankan proses *governance*, dan manajemen bertanggung jawab untuk menjalankan manajemen risiko dan proses pengendalian. Dalam praktik dewan komisaris, direksi, dan manajemen harus saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga pelaksanaan proses *governance*, manajemen risiko, dan pengendalian dapat berjalan secara efektif.<sup>3</sup>

Gambaran di atas merupakan kondisi ideal bagi sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Namun demikian, banyak perusahaan telah gagal dalam menjalankan proses *governance*, manajemen risiko dan pengendalian secara baik, sebagai contoh terjadinya skandal yang melibatkan sejumlah korporasi besar seperti Enron, Tyco dan WorldCom di Amerika, Parmalat di Italia, HIH Insurance di Australia, atau Bank Global, PT Kimia Farma dan Tbk, PT. Indofarma, Tbk dan lain-lain di Indonesia. Skandal tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan, investor dan *stakeholder* lainnya. Beberapa kegagalan *governance* lainnya dapat dilihat pada pembahasan *Good Corporate Governance* (GCG) di bab. 2.

Pada hakikatnya skandal tersebut terjadi karena lemahnya pengendalian dalam perusahaan dan menyebabkan perusahaan tidak dikelola secara efisien, sehingga dalam jangka panjang berpengaruh pada rendahnya kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Ditambah lagi dengan masih minimnya pengungkapan informasi yang disampaikan kepada publik mengenai kinerja dan efektivitas tingkat pengendalian perusahaan, banyak inefisiensi yang tidak tertangkap dan terefleksikan pada informasi keuangan dan catatan penjelasannya, serta berujung pada menurunnya kepercayaan investor terhadap integritas informasi keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan.<sup>4</sup>

Kondisi di atas khususnya pada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, mendorong dikeluarkannya Undang-Undang *Sarbanes-Oxley Act* (SOX), yang ditandatangani oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini mengatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan *governance*; yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Selain itu diatur pula mengenai hal-hal yang berkaitan dengannya sebagai berikut:

- Menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada dewan komisaris, komite audit dan pihak manajemen.
- Mendirikan *the Public Company Accounting Oversight Board*, sebuah dewan yang independen dan bekerja *full-time* bagi pelaku pasar modal.
- Penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan.
- Mendefinisikan jasa “non-audit” yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien.

- Memperbesar hukuman bagi terjadinya *corporate fraud*.
- Mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi *conflict of interest*.
- Menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru.<sup>5</sup>

Keberadaan sebuah mekanisme yang dapat membantu memastikan efektivitas pengawasan dalam proses *governance* merupakan faktor penting dalam masalah ini. Pembentukan komite audit (komite dewan komisaris) dan fungsi audit internal diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, sebab kedua fungsi ini termasuk ke dalam pilar struktur *governance*, di samping pilar lainnya seperti dewan komisaris, dewan direksi, manajemen senior, auditor eksternal, dan *shareholders*.<sup>6</sup>

Komite audit dibentuk dalam rangka mengoptimalkan kinerja dewan komisaris. Dengan adanya pengawasan yang optimal dari dewan komisaris akan membantu mengelola perusahaan dengan efisien dan efektif sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, komite audit memiliki peran yang cukup penting dalam mewujudkan GCG. Komite audit merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan, dan keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG.<sup>7</sup> Mungkin itulah sebabnya mengapa didalam Undang-Undang *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) di antaranya mengatur pembentukan komite audit yang independen, dan masih banyak peraturan lainnya yang menunjukkan perlunya pembentukan komite audit pada suatu perusahaan.

Sebelumnya, peran komite audit dalam perusahaan terkesan hanya sebagai simbol perpanjangan dari dewan

komisaris saja, sehingga banyak komite audit hanya menerima saja laporan keuangan yang disodorkan oleh manajemen, tanpa menelaahnya lebih lanjut. Kalaupun ada masukan hanyalah atas apa yang direferensikan dalam laporan keuangan, bukan atas penyelidikan atau temuan dari komite audit sendiri. Hal seperti ini membuat keberadaan komite audit menjadi tidak efektif. Ketidakefektivan ini terutama di Indonesia disebabkan oleh legitimasi, kualitas anggota, tugas dan tanggung jawab komite audit yang belum jelas, tidak lancarnya aliran komunikasi antara dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, peran komisaris yang oportunis, pemahaman fungsi komite audit yang rendah, dan kendala implementasi *corporate governance* yang berkaitan dengan fungsi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang masih kabur.<sup>8</sup>

Sekarang ini kedudukan dan fungsi komite audit sudah semakin penting dan sangat menentukan terutama kalau dilihat di dalam pedoman GCG, di mana komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan: laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; struktur pengendalian intern dilaksanakan dengan baik; pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; dan yang terakhir adalah tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan manajemen. Bahkan sekarang ini komite audit sudah memiliki pedoman khusus tentang pembentukan komite audit yang efektif, di mana peran dan tanggung jawabnya menjadi lebih luas yaitu meliputi pelaporan keuangan, manajemen risiko dan pengendalian, serta *corporate governance*.

Oleh karena itu, peran dan kiprahnya sangat ditunggu demi terwujudnya GCG, namun yang terpenting bagaimana mendapatkan pengakuan dan meyakinkan manajemen termasuk

audit internal untuk dapat menerima keberadaan komite audit, karena bagi sebagian pihak yang tidak memahami manfaat keberadaan komite audit, akan merasa tidak nyaman. Pemahaman ini sangat penting, sebab tanpa hubungan yang sinergis dengan manajemen dan audit internal dalam struktur *governance* membuat komite ini tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif, dan yang lebih penting lagi dalam hal ini, bahwa sikap independensi komite audit harus dipelihara dengan baik, sehingga independen tidak hanya secara lahiriah tetapi juga independen dalam kenyataan.

Fungsi lainnya dalam struktur *governance* yang berhubungan dengan pengawasan adalah fungsi audit internal, sebab keberadaan fungsi ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme pengawasan terutama untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan efektif dan pengendalian dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Audit internal juga dapat menjadi barometer standar perilaku di dalam organisasi melalui aktivitas pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan, yang mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien.

Apa yang berkembang sekarang ini adalah, bahwa fungsi audit internal menjadi sebuah fungsi yang berperan aktif sebagai mitra bagi manajemen dalam mendukung penerapan GCG dengan: melakukan evaluasi dan perbaikan proses kerja perusahaan yang berpengaruh pada penerapan nilai perusahaan dan terjaganya akuntabilitas; membantu menjaga efektivitas pengendalian dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi serta memberikan input untuk perbaikan yang berkesinambungan; dan melakukan identifikasi dan evaluasi risiko signifikan yang dihadapi perusahaan dan memberikan

masukannya demi perbaikan sistem pengendalian dan manajemen risiko.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya, proses *governance* berkaitan erat dengan proses manajemen risiko. Oleh karena itu, komite audit dan audit internal juga berperan aktif dalam pelaksanaan proses manajemen risiko. Komite audit berperan sebagai wahana ideal untuk meninjau ulang proses manajemen risiko, karena komite ini tidak memiliki tanggung jawab operasional sehari-hari, dan selanjutnya komite audit selalu mendiskusikan kebijakan yang berhubungan dengan penaksiran risiko dan manajemen risiko secara keseluruhan, serta mendiskusikan *exposure-exposure* risiko dan langkah-langkah untuk memonitor dan mengendalikan *exposure* risiko tersebut dengan dewan direksi. Sedangkan audit internal dapat melaksanakan aktivitas evaluasi dan perbaikan sistem manajemen risiko sesuai dengan keahliannya dengan cara menerapkan audit berbasis risiko pada setiap aktivitas audit yang dilakukannya, sebab risiko dapat secara objektif dikenali, diukur dan secara strategis dikelola dengan baik. Sebagai konsekuensinya, keahlian di dalam teknik manajemen risiko dan pengetahuan sekitar sistem pengendalian intern menjadi suatu sumber kekuatan yang memungkinkan auditor internal berperan penting di dalam suatu organisasi.<sup>10</sup>

Langkah berikutnya, dalam melaksanakan manajemen risiko secara optimal, diperlukan pengendalian intern yang handal karena sistem pengendalian intern merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen risiko. Oleh karena itu, komite audit dan fungsi audit internal, selain bertanggung jawab terhadap manajemen risiko juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengendalian internal dalam perusahaan telah berjalan dengan baik. Tanggung jawab komite audit dalam hal ini dapat dilaksanakan

melalui pemanfaatan laporan maupun diskusi dengan manajemen, *internal auditor*, dan *external auditor*. Keterlibatan aktif komite audit dalam mengevaluasi pelaksanaan dan perbaikan pengendalian intern oleh manajemen akan dapat mendorong timbulnya lingkungan pengendalian yang baik. Sementara fungsi audit internal membantu memastikan bahwa sistem pengendalian intern perusahaan telah dilaksanakan dengan semestinya dan dapat diandalkan.

Tentang pelaksanaan proses *governance*, manajemen risiko, dan pengendalian, proses ini juga harus dirancang untuk menanggulangi terjadinya *fraud* di dalam organisasi, sebab tindakan *fraud* juga akan memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, peran komite audit dan internal audit selanjutnya adalah dalam bidang pencegahan *fraud*. Komite audit perlu memahami peran mereka untuk memastikan bahwa organisasi telah mempunyai program *anti-fraud* dan pengendalian untuk membantu manajemen dalam pencegahan *fraud*. Selain itu di dalam menjalankan tugasnya, komite audit harus mengevaluasi, mengawasi dan memastikan bahwa hasil dari analisis *fraud risk* telah dimasukkan ke dalam kebijakan perusahaan, dan memeriksa bahwa semua rekomendasi pengendalian *fraud* telah dilaksanakan.<sup>11</sup> Demikian juga jika fungsi audit internal dapat berfungsi secara efektif maka akan sangat membantu dalam pencegahan *fraud* pada suatu organisasi, karena dengan pengetahuan yang dimilikinya, auditor internal mempunyai peran penting untuk membantu manajemen di dalam pencegahan *fraud*. Hasil survei KPMG tahun 2004, menemukan bahwa 65 persen tindakan *fraud* terbongkar melalui pekerjaan audit internal.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, sesungguhnya komite audit dan internal audit mempunyai tujuan yang sama di dalam mengawasi pelaksanaan proses *governance*, manajemen risiko dan pengendalian untuk meningkatkan pencapaian tujuan



## DAFTAR PUSTAKA

- AICPA . 2002. *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*. Statement on Accounting Standards (SAS) No. 99.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Fraud and the Responsibilities of the Audit Committee: An Overview*. From The AICPA Audit Committee Toolkit. New York.
- Akhmad Syakhroza. 2005. Corporate Governance: Sejarah dan perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 6-11.
- Albrecht, W, Staven and Chad Albrecht. 2004. *Fraud Examination & Prevention*. Thomson South-Western.
- Amrizal. 2004. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor. Melalui [http://www.bpkp.go.id/unit/investigasi/cegah\\_deteksi.pdf](http://www.bpkp.go.id/unit/investigasi/cegah_deteksi.pdf)
- Antonius Alijoyo, dan Subarto Zaini. 2004. *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Indeks. Jakarta.
- Antonius Alijoyo, 2003. Keberadaan dan Peran Komite Audit dalam Rangka Implementasi GCG. *Seminar Nasional GCG-FKSPI BUMN/D Wilayah Jawa Timur 7 Mei 2003*, Surabaya – Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Enterprise Risk Management Pendekatan Praktis*. Edisi Kedua, Ray Indonesia. Jakarta.
- Anonim. 2003. *Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif*. Disusun untuk Komite Nasional Good Corporate Governance. 30 Mei 2002. <[www.Google.com](http://www.Google.com)>
- Arens, Alvin A. Randal J. Elder, Mark S. Beasley, 2006. *Auditing And Assurance Service An Integrated Approach*. Pearson International Editon. New Jersey : Prentice Hall International.
- Arifin. 2005. Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan). Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Association of Certified Fraud Examiners/ACFE. 1999. Report on the Nation Occupational Fraud and Abuse. Melalui <http://www.cfenet.com/acfe-fraud.1999.pdf>.
- Assosiation of Certified Fraud Examiner (ACFE). 2004. Report To The Nation on Occupational Fraud & Abuse. Melalui <http://www.cfenet.com/acfefraud.2004.pdf>.
- Bank for International Settlements/BIS (2001). Internal audit in banks and the supervisor's relationship with auditors. Basel Committee on Banking Supervision. Agustus.
- Bedard, J. & Gendron, Y. 2006. On the constitution of audit committee effectiveness. *Accounting Organisations and Society*, 31, hlm. 211-239.
- Bishop, W.G., Hermanson, D.R., Lapedes, P.D. and Rittenberg, L.E. 2000. The Year of the Audit Committee. *Internal Auditor*. Vol. 57. hlm. 46-51.
- Boynton, William C. and Raymond N. Johnson. 2006. *Modern Auditing: Essurance Services and the Integrity of Financial Reporting*. Eighth Edition. United Stated of America: John Wiley & Sons, Inc, hlm. 386.
- Center for Professional Education/CPE .2006. Risk Management: Internal Controls & Fraud Prevention. Melalui <http://www.cpeonline.com/cpenew/courset.asp?topic1=A217/>.

- Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of Treadway Commission. 2004. *Internal Control-Integrated Framework*. Jersey City.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Enterprises Risk Management- Integrated Framework*. Jersey City.
- Cowan, Neil. 2004. *Corporate Governance That Works*. Prentice Hall Pearson Education South Asia Pte Ltd. Singapore.
- De Zoort, T., Hermanson, D. & Reed, S. 2002. Audit committee effectiveness: a synthesis of the empirical audit committee literature. *Journal of Accounting Literature*, 21, hlm. 38-76.
- Ernst & Young. 2005. *Preventing, detecting, investigating fraud: The audit committee's role*. Tapestry Networks, Inc. Melalui <[www.tapestry-networks.com](http://www.tapestry-networks.com)>.
- FCGI (2001), Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid 1, Edisi 3 Jakarta. Lihat juga I Nyoman Tjager. 2003..
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance. Seri Tata Kelola Perusahaan Jilid II.
- Gendron, Y., Bédard, J. and Gosselin, M. 2004. Getting Inside the Black Box: A Field Study of Practices in “Effective” Audit Committees. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. Vol. 23. hlm. 153-171.
- Graycar, Adam. 2000. *Fraud Prevention And Control In Australia*. Paper presented at the Fraud Prevention and Control Conference convened by the Australian Institute of Criminology in association with the Commonwealth Attorney-General’s Department and held in Surfers Paradise, 24-25 August.
- Hekinus Manao. 1997. *Peran Komite Audit dalam Pengelolaan Perusahaan:Ulasan Historis, Teori, Praktik, dan Perspektif*. Konvensi Nasional Akuntansi III .
- Hiro Tugiman. 2003. Auditor Internal Wajib Bersertifikat. *Auditor Internal-Media Auditing dan Corporate Governance*. Edisi Ketiga/Agustus, hlm. 23-27.
- Huda D. Santoso. Keterkaitan Sarbanes-Oxley Act, SAS No. 99, dan Corporate Governance: Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui. <[www.bpkp.gi.id](http://www.bpkp.gi.id)>.
- Ikatan Akuntan Indonesia-IAI. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*, Jakarta. Salemba Empat.
- Imbuh Salim. 2005. Komite Audit: Peran yang Diharapkan dan Sejauh Mana Eksistensinya. *Usahawan*, No. 11 TH XXXIV Nopember.
- Institute of Internal Auditors (IIA). 2004. *The Professional Practices Framework*. The IIA Research Foundation.
- \_\_\_\_\_. 2004. The Role of Internal Auditing in Enterprise-wide Risk Management. September 29. <[www.theiia.org](http://www.theiia.org)>.
- Institute of Chartered Accountant in Australia, 1994. *Standard For The Professional Practise of Internal Auditing*. Florida.
- I Nyoman Tjager, F. Antonius Alijoyo, Humprey R. Djemat dan Bambang Soembodo. 2003. “*Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*”. Prenhillindo, Jakarta.
- Irwan M. Habsyah. 2004. *Profit Komite Audit dan Hubungannya dengan Kinerja*. Forum Komite Audit 3: Kontroversi Seputar Slandarisasi Komile Audit - ISIOCOM: Jakarta.
- Jensen, M, and Meckling W. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3. hlm. 305-360.
- Kinney, William R. 2003. “*Auditing Risk Assessment and Risk Management Processes*”. In Research Opportunities in Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors Research Foundation. Florida.
- Khomsiyah. 2005. Internalisasi Good Corporate Governance dalam Proses Bisnis. *The Indonesia Institute For Corporate Governance*.

- KPMG. 2004. *Fraud Survey Report 2004*. A KPMG Forensic Publication. Melalui <[www.kpmg.com/fraudsurveyi.pdf](http://www.kpmg.com/fraudsurveyi.pdf)>.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Fraud Risk Management Developing a Strategy for Prevention, Detection, and Response*. Melalui <[www.kpmg.-com/fraud\\_web.pdf](http://www.kpmg.-com/fraud_web.pdf)>.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (KOPAI). 2004. Standar Profesi Audit Internal. Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- Leung, P., Cooper, B.J. and Robertson P. (2003), *The Role of Internal Audit in Corporate Governance*, *The Institute of Internal Auditors Research Foundation*, RMIT University Australia.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mas Achmad Daniri, dan Angela Indirawati Simatupang. Transformasi Audit Internal Menuju Terwujudnya Good Corporate Governance. <[www.google.com](http://www.google.com)>.
- Mas Ahmad Daniri. 2005. *Good Coeporate Governance. Konsep dan Penerapannya dalam Kontek Indonesia*. Penerbit Ray Indonesia, Jakarta.
- Mautz, R. K and Hussein A. Sharaf. 1964. *The Philosophy of Auditing*. Tenth Printing, USA. American Accounting Association.
- McIntosh, David. The Ernst & Young, 2000. *Centre for Business Innovation*. IIA International Conference. New York.
- Moeller, Robert R. 2004. *Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules*. John Willey & Sons, Inc.
- Muh. Arief Effendi. 2007. Peran Komite Audit dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah, Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan, Jakarta*, Volume 1, No.1, Mei 2005, hlm. 51-57.
- Pickett, K.H. Spencer. 2005. *Auditing The Risk Management Process*. USA: John Willey & Sons, Inc.
- Pricewaterhouse Coopers. 2003. *Fraud Prevention and The Audit Committee*. Melalui <[www.pwc.com/FraudPrevention/](http://www.pwc.com/FraudPrevention/)>.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Audit Committees–Good practices for meeting market expectations–2nd edition*. <[www.pwc.com/PwCAuditComm1.pdf](http://www.pwc.com/PwCAuditComm1.pdf)>.
- Sukrisno Agoes. 2005. *Peran Internal Audit Department, Enterprises Risk Management, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud dan Implikasinya kepada Peningkatan Mutu Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara. Penerbit Salemba Empat.
- Rading K.F, Sobel J.P, Anderson U.L, Head M.J, Ramamoorti S.R, and Salamasick M. 2007. *Internal Auditing: Assurance & Consulting Services*. The IIA Research Foundation.
- Raghunandan, K.R. Read, W.J. and Rama, D.V. (2001) Audit Committee Composition, Gray Directors, and Interaction with Internal Auditing. *Accounting Horizons*, Vol. 15, hlm. 105-118.
- Ramamoorti, Sridhar. 2003. *Internal Auditing: History, Evolution, And Prospects*. The Institute of Internal Auditors Research Foundation. Florida.
- Sarens, G. and De Beelde, I. 2006. *Internal Audit: The Expert in Providing Comfort to The Audit Committee. The case of risk management and internal control*. Working Paper Faculteit Economie En Bedrijfskunde Universiteit Gent. Belgium.
- Schröck, G. 2002. *Risk Management and Value Ceation in Financial Institutions*. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey.
- Spira, L.F. and Page, M. 2003. Risk Management: the Reinvention of Internal Control and the Changing Role of Internal Audit. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol.16. No 4. hlm. 640-661.

- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga, Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Sofyan A. Jalil. 2000. Good Corporate Governance. Makalah disampaikan pada Seminar *Corporate Governance* di Universitas Sumatera Utara pada tanggal 26 Juni 2000.
- Vankataraman, V. 2005. *Audit Committee Handbook*. New Delhi. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited. New Delhi.
- Walker, Paul L dan William G Shenkir. 2006. Enterprise Risk Management And The Strategy-Risk-Focused Organization. *Cost Management*. May/Jun. Vol. 20. No. 3. hlm. 32.
- Wells, Joseph T. 2005. *Principles of Fraud Examination*. John Willey & Sons, Inc.